



DIINTERVENSI EMPAT PROGRAM PERCEPATAN

Seluruh Unsur Kehidupan Terfasilitasi Kesehatan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memastikan seluruh unsur kehidupan masyarakat sudah terfasilitasi dengan layanan kesehatan. Terutama sejak bayi dilahirkan hingga warga lanjut usia (lansia) yang ada di Kota Yogya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menyebut dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh unsur kehidupan tersebut pihaknya melakukan intervensi melalui empat program percepatan atau quic win. "Jangkauan akses kesehatan di masyarakat akan terus kami perkuat. Setidaknya sudah ada empat program percepatan yakni cek kesehatan gratis, satu kampung satu bidan atau tenaga kesehatan, jaminan kesehatan, dan Posyandu Paripurna bidang kesehatan yang terintegrasi layanan primer," urainya, Selasa (6/5).

Keempat program percepatan itu pun sudah diintegrasikan dengan Hasta Jogja Mulia atau delapan program strategis yang digagas oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogya, Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan. Melalui program strategis tersebut dijabarkan lebih rinci dalam program unggulan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Emma menambahkan, untuk program cek kesehatan gratis dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Yogya dan diprioritaskan untuk para kelompok lansia. Hal ini lantaran jumlah warga lansia yang berusia di atas

55 tahun di Kota Yogya cukup banyak yakni mencapai 35.361 jiwa. Selain itu, lanjutnya, para lansia memiliki potensi risiko penyakit hipertensi dan diabetes melitus yang tinggi. "Khusus pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia, kami menargetkan 35.361 jiwa ini dapat selesai pada 24 Mei 2025 mendatang," ujarnya.

Sementara terkait program satu kampung satu bidan atau tenaga kesehatan (nakes), Emma mengatakan jika pihaknya telah menempatkan 169 bidan ataupun nakes untuk mengampu seluruh kampung di Kota Yogya. Bidan atau nakes tersebut diambil dari puskesmas dan rumah sakit yang dikelola Pemkot Yogya seperti RS Jogja dan RS Pratama.

Dalam program ini, para bidan atau nakes wajib mengetahui tentang situasi kesehatan di kampung yang mereka ampu. "Mereka harus punya data terkait kesehatan lingkungan, keanggotaan BPJS Kesehatan, masyarakat miskin, jumlah lansia, jumlah ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, jumlah stunting, dan indikator-indikator lainnya di wilayah yang mereka ampu," imbuh Emma.

Program selanjutnya adalah jaminan kesehatan. Program ini memas-

tikan warga yang tidak terjangkau dalam kepesertaan BPJS Kesehatan tetap mendapatkan layanan kesehatan. Terutama cukup dengan menunjukkan KTP Kota Yogya dan akan langsung memperoleh fasilitas kesehatan gratis setara kelas tiga. "Cukup dengan membawa KTP yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga Kota Yogya, masyarakat sudah berhak memperoleh layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit kelas tiga. Ini sama halnya dengan Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah atau PDPD," ungkapnya.

Bahkan, terang Emma, penduduk yang tidak berdomisili namun mengalami kejadian kegawatdaruratan di wilayah Kota Yogya juga terkover oleh jaminan. Selama 1x24 jam layanan kesehatan di rumah sakit sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot Yogya melalui PSC YES 118. Sedangkan program percepatan terkahir adalah Posyandu Paripurna bidang kesehatan yang terintegrasi layanan primer. Di Kota Yogya, tambahnya memiliki 352 posyandu intergrasi layanan primer (ILP). Selain itu Posyandu ILP ini wajib memiliki layanan untuk seluruh siklus hidup seperti layanan untuk ibu hamil, balita, anak sekolah, remaja, usia dewasa, dan lansia. "Di dalam Posyandu ILP ini juga wajib memiliki minimal 5 orang kader terlatih yang memiliki keterampilan dasar kader," ujarnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Wakil Walikota			
3. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005